

**PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN DAN
KEBERADAAN KOMITE AUDIT TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(STUDI PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN *REAL ESTATE* YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2016)**

Puput Pradasari¹⁾

Nanik Ermawati²⁾

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus

Email ¹⁾puputprada938@gmail.com ²⁾nanik.ermawati@umk.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the influence of proportion of independent directors and the existence of an audit committee against tax avoidance. The population in this study is an industrial companies and real estate properties listed on the Indonesia Stock Exchange period of 2012-2016. The sample selection is conducted by using purposive sampling method, therefore as many as 173 of observation sample was obtained. Analysis technique to examine the hypotheses is multiple linier regressions. The result of this research shows proportion of independent directors have no significant on tax avoidance. The existence of an audit committee has positive significant influence on tax avoidance

Keywords: Proportion of independent directors, the existence of an audit committee, tax avoidance.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran yang dilakukan terhadap pribadi perorangan atau badan yang dilakukan oleh negara dalam rangka mensejahterakan masyarakat dengan sifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak digunakan untuk mendanai berbagai kepentingan publik, diantaranya adalah peningkatan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta untuk pembangunan di daerah (www.kemenkeu.go.id). Pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan dari sektor pajak mengingat sangat vitalnya kegunaan pajak bagi negara. Namun dalam prakteknya, masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Hal tersebut

disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak agar kesejahteraan masyarakat terpenuhi, sedangkan wajib pajak berusaha untuk mengurangi pembayaran pajak karena pajak dianggap sebagai pengurang pendapatan.

Salah satu cara untuk mengurangi pembayaran pajak adalah dengan melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2011: 9). Tidak adanya aturan yang dilanggar menegaskan bahwa *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tetapi tindakan itu tidak

diinginkan oleh pemerintah karena mengurangi penerimaan negara. Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *cash effective tax rate* (CETR). CETR adalah kas yang digunakan untuk membayar pajak dibagi laba sebelum pajak. Tingkat *tax avoidance* yang tinggi digambarkan dengan nilai CETR yang rendah, sedangkan tingkat *tax avoidance* yang rendah ditunjukkan dengan nilai CETR yang tinggi. Tarif pajak penghasilan untuk badan adalah sebesar 25%, apabila persentase CETR mendekati 25% maka tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan semakin rendah (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Persentase tingkat *tax avoidance* perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 berdasarkan pengukuran *cash effective tax rate* (CETR) pada tahun 2012 sebesar 44%, tahun 2013 sebesar 47%, tahun 2014 sebesar 59%, tahun 2015 sebesar 38% dan tahun 2016 sebesar 50%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa *tax avoidance* masih banyak dilakukan oleh perusahaan properti dan *real estate* di Indonesia.

Dalam praktek *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan terdapat keterkaitan antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajer sebagai *agent*. Pemegang saham menginginkan laba yang tinggi dengan cara mengurangi pembayaran pajak. Namun, keputusan untuk melakukan praktek *tax avoidance* dibuat oleh manajer dan manajer menginginkan timbal balik terhadap sumber daya yang dimiliki perusahaan. *Corporate governance* diharapkan dapat mengendalikan

akibat dari masalah agensi ini terhadap *tax avoidance*.

Corporate governance dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus memiliki komisaris independen yang tugasnya adalah menciptakan tata kelola yang baik dalam perusahaan, memberi nasihat dan mengawasi jalannya perusahaan. (Sitorus, 2012). Selain itu, perusahaan juga diharuskan untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen yang bertugas untuk proses pembuatan dan pengawasan internal (Sari, 2014).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori agensi merupakan hubungan kontrak antara satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau prinsipal) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling, 1976).

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2011: 9).

Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Kedudukan komisaris independen pada dasarnya sama dengan anggota dewan komisaris lainnya, yakni sebagai badan pengawas dan pemberi

nasihat kepada direksi (Hidayati dan Fidiana, 2017).

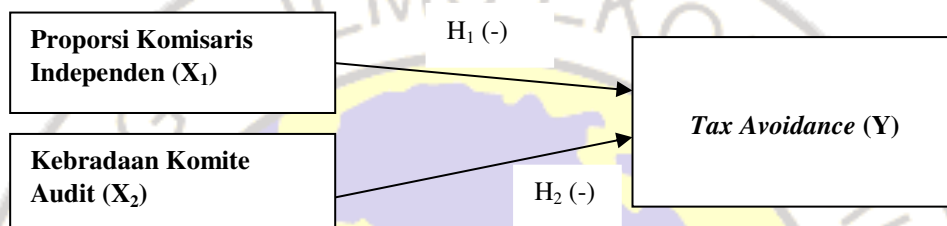
Keberadaan Komite Audit

Komite audit adalah komite yang bersifat independen dan dibentuk oleh dewan komisaris yang

bertugas untuk membantu fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas manajemen resiko, pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit dalam perusahaan (Hidayati dan Fidiana, 2017).

Kerangka Teoritis

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Sumber: dikembangkan dari jurnal Wijayani (2016) serta Asri dan Suardana (2016)

Hipotesis Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Berhubungan dengan teori agensi, keberadaan komisaris independen yang tidak memihak prinsipal maupun agen akan mengurangi konflik kepentingan antara kedua belah pihak. Selain itu, komisaris independen memiliki tugas untuk mengawasi dan kinerja manajemen sehingga manajer akan bekerja lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan operasional perusahaan, sehingga praktek *tax avoidance* dalam perusahaan dapat diminimalisir.

Penelitian yang dilakukan oleh Lionita dan Kusbandiyah (2017) dan Wijayani (2016) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, semakin tinggi proporsi

komisaris independen maka akan semakin rendah *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H₁: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Keberadaan Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Berhubungan dengan teori agensi, komite audit berfungsi membantu dewan komisaris agar tidak terjadi asimetri informasi antara pihak prinsipal dan agen, dengan melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, sehingga manajer akan bekerja lebih transparan dalam menyajikan laporan keuangan, dengan demikian praktek *tax avoidance* dalam perusahaan dapat diminimalisir.

Hasil penelitian Sandy dan Luxviarman (2015) serta Asri dan

Suardana (2016) menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dari komite audit terhadap *tax avoidance*, yaitu semakin tinggi keberadaan komite audit maka praktek *tax avoidance* akan semakin rendah. Berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H₂: Keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan proses pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau penilaian tertentu (Subagiastra dkk, 2016). Adapun hasil pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Hasil Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Tahun					Jumlah
		2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Perusahaan properti dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.	41	41	42	46	46	216
2.	Perusahaan properti dan <i>real estate</i> yang terdaftar 5 tahun secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2016	41	41	41	41	41	205
3.	Perusahaan tidak mempublikasikan laporan keuangan yang berakhir 31 Desember dan laporan tahunan yang lengkap	(3)	(0)	(0)	(1)	(2)	(6)
4.	Perusahaan mengalami kerugian	(4)	(7)	(2)	(6)	(5)	(24)
Jumlah sampel amatan		34	34	39	34	34	175
Data <i>outlier</i>		(0)	(0)	(0)	(1)	(1)	(2)
Data setelah <i>outlier</i>		34	34	39	33	33	173

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018

Pengukuran Variabel

1. Tax Avoidance

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}$$

2. Proporsi Komisaris Independen

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}}$$

3. Keberadaan Komite Audit

$$\text{Keberadaan Komite Audit} = \frac{\text{Jumlah Komite Audit}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}$$

Sumber: Rosalia dan Sapari, 2017

4. HASIL

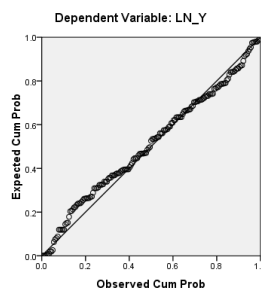
Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016: 154).

Gambar 2
Grafik P-Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: data sekunder yang diolah, 2018.

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah terdistribusi secara normal dan model regresi dapat digunakan untuk pengujian berikutnya.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2016).

Tabel 2
Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Proporsi Komisararis	0,782	1,279

Independen		
Keberadaan Komite Audit	0,782	1,279

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018

Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* seluruh variabel lebih dari 0,1 dan nilai VIF seluruh variabel kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak mempunyai masalah multikolonieritas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2016).

Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
Regression	2,046

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* (DW) atau d sebesar 2,046, dengan melihat tabel *Durbin-Watson* maka nilai d_u sebesar 1,7747, nilai d_{4-d_u} sebesar 2,2253. Dapat disimpulkan bahwa $d_u < d < d_{4-d_u}$ ($1,7747 < 2,046 < 2,2253$), sehingga dalam model regresi tidak terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016).

Tabel 4 Hasil Uji Glejser

Variabel	Sig.
(Constant)	1,000
Proporsi Komisaris Independen	1,000
Keberadaan Komite Audit	1,000

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji *glejser* diatas diperoleh bahwa variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 5
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Variabel	Unstandardized Coefficients
	B
(Constant)	0,098
Proporsi Komisaris Independen	0,091
Profitabilitas	0,080

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 5 persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 0,098 + 0,091X_1 + 0,080X_2 + \varepsilon$$

Pengujian Hipotesis Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).

**Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	Adjusted R Square
Regression	0,027

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018

Dari tabel 6 diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0,027. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen (proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit) dapat menjelaskan variabel dependen (*tax avoidance*) sebesar 2,7% dan sisanya 97,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

**Tabel 7
Hasil Uji Statistik F**

Model	F	Sig.
Regression	3,420	0,035

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 3,420 dengan nilai signifikansi 0,035 kurang dari 0,05, yang berarti

bahwa proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan secara individual dalam menjelaskan variabel-variabel dependen (Ghozali, 2016).

Tabel 8
Hasil Uji Statistik t

Variabel	t	Sig.
Proporsi Komisaris Independen	0,347	0,729
Keberadaan Komite Audit	2,454	0,015

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui:

1. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*
Nilai t hitung sebesar 0,347 dengan nilai signifikansinya 0,729 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) ditolak.
2. Pengaruh Keberadaan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*
Nilai t hitung sebesar 2,454 dengan nilai signifikansinya 0,015 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel keberadaan komite audit berpengaruh positif signifikan

terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) ditolak.

5. PEMBAHASAN

Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berhubungan dengan teori agensi, keberadaan komisaris independen yang tidak memihak prinsipal maupun agen akan mengurangi konflik kepentingan antara kedua belah pihak. Dalam penelitian ini proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena komisaris independen gagal melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen dan cenderung netral, sehingga proporsi komisaris independen tidak dapat mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen serta keberadaannya tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Keberadaan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Berhubungan dengan teori agensi, komite audit berfungsi membantu dewan komisaris agar tidak terjadi asimetri informasi antara pihak prinsipal dan agen, dengan melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan. Dalam penelitian ini keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, semakin tinggi jumlah komite audit mengakibatkan proses pengawasan pelaporan keuangan tidak berjalan efektif, sehingga semakin tinggi keberadaan komite audit maka akan semakin tinggi praktek *tax avoidance* dalam perusahaan.

6. PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Keterbatasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yaitu proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit hanya mampu mempengaruhi *tax avoidance* sebesar 2,7%.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*, misalnya likuiditas, kepemilikan institusional dan kualitas audit yang dilakukan oleh Rosalia dan Sapari (2017). Berdasarkan koefisien determinasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rosalia dan Sapari (2017) menunjukkan bahwa variabel independen (profitabilitas, likuiditas, dan *corporate governance* yang diprosikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit) mampu mempengaruhi *tax avoidance* sebesar 62,5%.

DAFTAR PUSTAKA

Asri, I.A.T.Y. dan Suardana, Ketut Alit. 2016. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Volume 16, Nomor 1:72-100. Bali: Universitas Udayana.

Dewinta, I.A.R. dan Setiawan, Putu Ery. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*. Volume 14, Nomor 3: 1584-1613. Bali: Universitas Udayana.

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hidayati, Nurul dan Fidiana. 2017. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 6, Nomor 3: 1052-1070. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

Jensen, Michael C., and Meckling, William H. 1976. *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*. Volume 3, Nomor 4: 305-360.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. APBN 2017. <https://www.kemenkeu.go.id/>

Lionita, Adinda dan Kusbandiyah, Ani. 2017. Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *Leverage*, dan Komisaris Independen terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang terdaftar di BEI. *Kompartemen*. Volume 15, Nomor 1: 1-11. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rosalia, Yuliesti dan Sapari. 2017. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 6, Nomor 3. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).
- Sandy, Syeldila dan Lukviarman, Niki. 2015. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi*. Padang: Universitas Andalas.
- Sari, Gusti Maya. 2014. Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal WRA*. Volume 2, Nomor 2. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Sitorus, I.J. 2012. Analisis Peran Komite Audit yang Efektif dan Independensi Dewan Komisaris (Studi pada Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia). *Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis Bandung*. Bandung: Universitas Widyatama.
- Subagiastra, K., Arizona, I.P.E., dan Mahaputra, I.N.K.A. 2016. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Volume 1, Nomor 2: 167-193. Bali: Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Wijayani, Dianing Ratna. 2016. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, *Corporate Governance*, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*. Volume 13, Nomor 2: 181-192. Jepara: UNISNU Jepara.
- www.idx.co.id